

## **FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI DAPODIK DALAM PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DI SMP NEGERI 2 KWANDANG**

**Nolfi S. Tueno**

**Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo**

[nolfitueno@gmail.com](mailto:nolfitueno@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru di SMP Negeri 2 Kwandang. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan studi dokumentasi. pengumpulan data melalui observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, Fokus penelitian yaitu Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru di SMP Negeri 2 Kwandang yang lebih mengarah pada Pengetahuan, Koneksi Internet dan Sistem *Backup* Data. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pengetahuan Operator dalam Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru sudah baik, namun terdapat hambatan lain yaitu Sistem Aplikasi dapodik setiap tahun atau setiap semester mengalami perubahan dan kurangnya bantuan dari guru-guru dalam hal kelengkapan berkas dari mereka sendiri, Koneksi Internet dalam hal Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembyaran Tunjangan Profesi Guru kurang menunjang Demikian juga dengan Sistem Backup Data yang belum ada sehingga menyulitkan Operator dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Pofesi Guru jika Leptop/PC rusak dan harus mengambil data dari Server Pusat. Untuk itu peneliti menyarankan Pihak Sekolah terutama kepala Sekolah agar kiranya tetap mengembangkan pengetahuan Operator melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan dan memberikan pemahaman terhadap guru-guru betapa pentingnya berkas mereka dalam hal Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru, Koneksi internet Kiranya kepala sekolah dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam hal memperlancar Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik, demikian juga Sistem Backup Data agar kepala sekolah dapat menyarankan kepada pengembang Aplikasi Dapodik dapat menyediakan Sistem Backup Data.

**Kata Kunci: Aplikasi Dapodik; Pembayaran; Tunjangan; Profesi Guru**

### **ABSTRACK**

*This research was conducted to find out and describe the inhibiting factors for the implementation of the Dapodik Application System in the Payment of Professional*

*Allowance for Teachers in SMP Negeri 2 Kwandang. The research method uses a descriptive type of qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews with several informants, observation, and study of documentation. data collection through observation and recording of secondary data related to research problems, the focus of the study is the inhibiting factors for the implementation of the Dapodik Application System in the Payment of Professional Allowances for Teachers in SMP Negeri 2 Kwandang which is more directed towards Knowledge, Internet Connection and Data Backup Systems. Based on the description of the results of research and discussion, it was concluded that the knowledge of Operators in the Dapodik Application System Implementation in the Payment of Professional Allowance for Teachers was already good, but there were other obstacles, namely the Dapodik Application System every year or every semester experienced changes and lack of assistance from teachers in terms of completeness of the files from themselves, the Internet Connection in terms of Implementing the Dapodik Application System in Payment of Teacher Professional Allowances is not very supportive Likewise, the Data Backup System that does not yet exist thus making it difficult for Operators to implement the Dapodik Application System in Payment of Teacher Professional Allowance if the Laptop / PC is damaged and must retrieve data from the Central Server. For this reason, researchers suggest that the School Principals, especially Principals, should continue to develop Operator knowledge through training conducted by the Office of Education and provide understanding to teachers how important their files are in terms of Dapodik Application System Implementation in the Payment of Professional Allowance for Teachers, Internet Connection Presumably the principal can cooperate with related parties in terms of smoothing the Dapodik Application System Implementation, as well as the Data Backup System so that the school principal can advise the Dapodik Application developer to make a Backup Data System available.*

**Keywords: Dapodik Application; Payment; Allowances; Teacher's profession**

---

## PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Visi Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah.

Adapun langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut antara lain: (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) Meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional, regional maupun internasional; (3) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (5) Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan; (6) Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan langkah-langkah reformasi atau menyempurnakan sistem pendidikan yang meliputi: (1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik sehingga terjadi pergeseran paradig, proses pendidikan dari paradigma pengajaran keparadigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang menitikberatkan peran pendidik dalam menstranformasi pengetahuan

bergeser ke paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya; (2) Perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh.

Program perencanaan pendidikan nasional merupakan salah satu bagian penting dalam proses mewujudkan rencana strategis pembangunan pendidikan nasional, yaitu: peningkatan akses, mutu, tata kelola dan akuntabilitas pendidikan nasional. Untuk membangun program perencanaan pendidikan yang valid, terukur dan berkesinambungan diperlukan data-data pendukung yang lengkap, valid, akuntabel, dan terbaru (*up to date*).

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, pada awal tahun 2006 Biro Perencanaan Setjen Depdiknas membangun sistem pendataan terbaru dimana proses transaksi datanya dilakukan dalam skala mikro secara terpusat, daring (*online*) dan dalam waktu-nyata (*real time*) yang disebut dengan sistem Dapodik. Untuk mendukung sistem Dapodik tersebut, Biro Perencanaan Setjen Depdiknas juga membangun sistem jaringan pendidikan skala nasional yang disebut dengan Jardiknas (Jejaring Pendidikan Nasional). Melalui media Jardiknas inilah sistem Dapodik dapat diakses dan dioperasikan secara langsung *online* dan *real time* oleh seluruh Kantor Dinas Pendidikan Propinsi/Kota/Kabupaten se Indonesia.

Dapodik adalah suatu sistem pendataan dan pengelolaan data-data pendidikan yang bersifat mikro secara *online* dan *real time*. Terdapat 3 (tiga) jenis data utama pendidikan yang dikelola pada sistem dapodik, meliputi: data sekolah, data siswa dan data guru/karyawan. Sistem Dapodik dirancang bangun menggunakan basis *open source* dengan menerapkan sistem database terpusat dan aplikasi berbasis *web*. Dengan sistem tersebut maka pengelolaan riwayat data sekolah, siswa, guru/karyawan lebih mudah terintegrasikan dan disimpan secara terpusat dan dapat diakses dengan lebih mudah dan terbuka oleh masyarakat dalam batasan tertentu melalui internet. Selain itu proses pemutakhiran data dapat dilakukan secara langsung *online* dan *real time* oleh setiap Dinas Pendidikan baik di tingkat Provinsi, Kota atau Kabupaten di seluruh Indonesia memanfaatkan koneksi internet.

Untuk melaksanakan perencanaan pendidikan, maupun untuk melaksanakan program-program pendidikan secara tepat sasaran, dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan terus *up to date*. Dengan ketersediaan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan *up to date* tersebut, maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Atas dasar permasalahan itulah kemudian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

pada saat itu, melakukan strategi yang sifatnya memaksa, dengan menerbitkan aplikasi yang mengatur administrasi tiap satuan pendidikan yang dikenal dengan Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Aplikasi ini diluncurkan dalam 2 (dua) tahap, yang pertama bagi jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) pada awal tahun 2011, dan pada tahapan kedua bagi jenjang pendidikan menengah dan kejuruan diberlakukan mulai tahun ajaran 2014/2015.

Dalam proses pengentrian data pada aplikasi dapodik, mengacuh pada penyesuaian kapasitas suatu satuan pendidikan yang meliputi ruang kelas, pembagian rombongan belajar, siswa dan guru serta sarana dan prasarana pendukung di satuan pendidikan tersebut. Yang mana dalam pengentrian data-data tersebut berkaitan dengan hasil akumulasi satu dengan yang lainnya. Dan dalam kaitannya dengan persebaran guru pada setiap satuan pendidikan di daerah, aplikasi ini mengadopsi aturan mengenai pemberlakuan rasio kelas, rombel, guru, siswa dan pendanaan yang akan diberikan ke satuan pendidikan masing-masing. Terfokus pada keadan guru di masing-masing satuan pendidikan, apakah mengalami kekurangan guru atau kelebihan guru.

Sebagai contoh, satuan pendidikan yang pada kenyataannya kelebihan guru maka tunjangan mereka akan dibayarkan sesuai dengan porsi guru menurut kebutuhan di satuan pendidikan tersebut. Hal ini berdampak pada proses pendataan guru, di mana guru yang berada di satuan pendidikan berkelebihan guru akan

berusaha sendiri untuk mencari jam mengajar atau pindah ke satuan pendidikan lainnya yang notabene membutuhkan guru atau memang kekurangan guru.

Hal ini sangat berpengaruh pada proses pembayaran tunjangan profesi guru yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru akan dikeluarkan surat keputusan (SK) Pembayaran Tunjangan Profesi Guru yang berdasarkan Dapodik. Apabila data tidak akurat, Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak dapat diterima oleh Guru bersertifikat.

Demikian halnya yang terjadi di SMP Negeri 2 Kwandang Sebagai sekolah penyelenggara Sistem Aplikasi Dapodik namun belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah disebabkan oleh minimnya pengetahuan dari Operator sekolah karena dalam setiap tahun aplikasi Dapodik dilakukan perubahan oleh tim pengembang aplikasi Dapodik, minimnya pengetahuan operator ini disebabkan oleh rilisnya aplikasi versi baru yang tidak diawali dengan sosialisasi oleh Tim Pengembang Aplikasi kepada Admin Dinas Pendidikan di setiap Kabupaten.

Hal ini sudah tentu akan menyilitkan bagi Admin Kabupaten sangat sulit untuk mengatasi masalah yang terjadi di tingkat satuan pendidikan, misalnya pembaharuan pada fitur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yaitu penambahan fitur Riwayat (RWY) Sertifikasi dan fitur Riwayat (RWY) Pendidikan Formal pada saat penambahan Kompetensi pada

rincian Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), apabila fitur ini tidak terisi dengan benar maka dan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) akan terbaca invalid, dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang ada pada aplikasi secara umum dan apabila tidak dipahami oleh operator dalam penginputannya maka akan berpengaruh pada pembayaran tunjangan profesi guru dikarenakan tidak bisa melakukan sinkronisasi dapodik karena masih ada data invalid. sulitnya akses internet yang menyebabkan data lokal yang seharusnya disinkronkan ke server pusat mengalami kendala karena lemahnya koneksi internet, terhambatnya pembayaran tunjangan profesi guru bukan hanya disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan data pada aplikasi namun juga sangat dipengaruhi oleh kondisi yang di lapangan dimana satuan pendidikan tidak susah untuk mengirim data secara *online* ke pusat dikarenakan tidak maksimalnya koneksi internet di wilayah masing-masing.

Pada sistem SMP Negeri 2 Kwandang yang letaknya cukup jauh dari perkotaan, walaupun data sudah terinput secara lengkap pada aplikasi dapodik namun tidak mudah untuk mengirim data ke server pusat dalam batas waktu pemutahiran data yang telah ditentukan oleh pusat. Tidak adanya sistem *backup* data Lokal, sehingga jika ada kesalahan (*error*) pada PC / Laptop operator maka data akan hilang, dengan adanya Sistem Pendataan secara *online* melalui aplikasi Dapodik sangat memudahkan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan

program, demikian halnya dengan penetapan kebijakan bagi guru penerima tunjangan profesi cukup dengan menganalisis data yang dikirim melalui Aplikasi secara *online* oleh satuan pendidikan. Namun hal ini belum bisa dimanfaatkan secara penuh oleh satuan pendidikan bahkan tingkat kabupaten karena data yang terkirim ke pusat tidak memiliki *backup* data lokal baik di sekolah maupun di dinas kabupaten sehingga apabila terjadi masalah pada laptop atau PC maka semua data akan hilang dan untuk mendapatkannya kembali harus melalui *website* dapodik, akan tetapi apabila koneksi *internet* tidak maksimal maka data yang di *download* tidak bisa ditemukan secara utuh. Sehingga apabila terjadi kekeliruan pada data PTK penerima tunjangan yang sudah terkirim sebelumnya maka untuk memperbaikinya harus diinput dari data awal dalam aplikasi Dapodik.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru di SMP Negeri 2 Kwandang

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru di SMP Negeri 2 Kwandang

### Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Aplikasi DAPODIK dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru di SMP Negeri 2 Kwandang, yaitu:

#### Pengetahuan

Yang dimaksud adalah pengetahuan operator tentang aplikasi dapodik di SMP Negeri 2 Kwandang

#### Koneksi Internet

Yang dimaksud adalah akses penting dalam penerapan Aplikasi Dapodik yang merupakan Aplikasi Berbasis Online di SMP Negeri 2 Kwandang

#### Sistem Backup Data

Yang dimaksud adalah sistem backup data lokal Aplikasi Dapodik di SMP Negeri 2 Kwandang

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiono (2010:62) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap satu variabel atau lebih, dimana prosedur penelitian deskriptif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan pendekatan metode kualitatif adalah jenis penelitian berdasarkan pendekatan yang digunakan yakni penelitian dilakukan pada kondusif obyek yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen utamanya/instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan

secara gabungan dan menghasilkan data bersifat deskriptif (Wiratha, 2006 : 134).

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian menurut Ridwan (2005:97), “Dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer dan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder”. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan dalam hal ini Unsur SMP Negeri 2 Kwandang sebanyak 5 (Lima) Orang yang terdiri dari Kepala Kepala Sekolah, dan Staf Pengajar di SMP Negeri 2 Kwandang 3 orang dan tenaga administrasi/operator Dapodik 1 (satu) Orang. Data sekunder adalah data yang tersedia di lokasi penelitian yang dapat dipergunakan sebagai dasar penunjang dalam menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan membaca macam buku dan literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Observasi dalam penelitian kualitatif menurut Creswell (2010:267), merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian; (b) Wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Creswell (2010:267), “Peneliti melakukan wawancara *face to face interview* (berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat

terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan”; (c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah- langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: (a) Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; (b) Reduksi data. Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian; (c) Penyajian data Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agarb data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola

hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga informasi yang dapat disimpulkan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. *Display* data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya (Sugiono:2006)

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru di SMP Negeri 2 Kwandang adalah Pengetahuan Operator, Koneksi Internet dan Sistem Backup Data Lokal.

Sehubungan dengan Fokus pengetahuan peneliti memfokuskan pada Pengetahuan Operator dapodik dalam Pembayaran tunjangan profesi Guru di SMP Negeri 2 Kwandang. Peningkatan pengetahuan Operator Dapodik untuk pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik

dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru ini sangat penting sebab tanpa pengetahuan tersebut, maka Operator tidak dapat melaksanakannya oleh karena itu sangat dibutuhkan Pelatihan-pelatihan ataupun Bimbingan Teknik untuk pengembangan pengetahuan Operator Dapodik agar dalam Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru tidak terhambat. Pengetahuan Operator Dapodik di SMP Negeri 2 Kwandang mengenai Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran tunjangan Profesi Guru sudah cukup baik, namun sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan peneliti terdapat hambatan lain yang dialami operator dapodik yaitu adanya perubahan aplikasi pada setiap tahun ajaran dan kepedualian dari para guru-guru dalam melampirkan berkas mereka sehingga memperlambat pengimputan untuk pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru.

Sehubungan dengan Fokus penelitian tentang Koneksi Internet peneliti memfokuskan pada Koneksi Internet terhadap Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran tunjangan profesi Guru di SMP Negeri 2 Kwandang

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebelumnya terutama pada hasil penelitian dan pembahasan, dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut: (a) Pengetahuan operator tentang pelaksanaan Sistem Aplikasi

Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru masih kurang, hal ini terkendala dengan adanya perubahan sistem aplikasi setiap tahun bahkan setiap semester yang tidak disosialisasikan atau tidak diadakannya pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan kepada operator Dapodik dan terdapat juga hambatan lain yaitu kurangnya partisipasi guru-guru dalam memasukan berkas untuk diinput dalam aplikasi dapodik; (b) Koneksi Internet kurang menunjang dalam pengiriman data ke server pusat sehingga menghambat pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru, terbukti dalam setiap pengiriman sering ada data guru-guru yang tidak valid sehingga guru itu tertunda untuk menerima tunjangan profesi guru; (c) Sistem Backup data di daerah belum ada sehingga setiap ketika data error atau Laptop/PC operator rusak sangat sulit untuk menarik data dari server pusat untuk memperolehnya kembali, karena diakibatkan oleh jaringan yang sering tidak menunjang, sehingga untuk memperoleh data operator harus menginput kembali data guru kedalam Sistem Aplikasi Dapodik; (d) Pengetahuan Operator tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran tunjangan sudah baik, namun terhambat dengan adanya Sistem Aplikasi setiap tahunnya berubah-ubah, Koneksi Internet belum maksimal dalam rangka penginputan data untuk Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru serta Belum adanya Sistem Backup data sehingga sangat sulit untuk mengambil

kembali data dari server pusat jika Laptop/PC Operatos rusak atau Error.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut: (a) Diharapkan Operator dapat mengembangkan pengetahuan mengenai Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru, walaupun Sistem Aplikasi setiap tahun berubah-ubah; (b) Diharapkan kepada Kepala sekolah dan Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Penyedia layanan koneksi internet demi lancarnya Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru; (c) Diharapkan Kepada kepala sekolah dan Dinas Pendidikan bekerja sama dengan pengembangan aplikasi agar menyediakan Sistem Backup Data demi lancarnya pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru; (d) Diharapkan kepada Operator agar tetap mengembangkan Pengetahuan mengenai Pelaksanaan Sistem Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru, sehingga memperlancar penginputan Dapodik, Untuk Koneksi internet juga diharapkan kerja sama antara Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan untuk bekerjasama dengan Penyedia layanan Internet agar pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru berjalan dengan lancar dan oleh Dinas Pendidikan agar dapat menyarankan kepada pengembang Sistem

Aplikasi untuk menyediakan Sistem Backup Data.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Edisi ke 3. Yogyakarta: Centra Grafindo.
- Daryanto. 2011. *Sari Kuliah Manajemen Pemasaran*, Bandung: PT. Sarana
- Darmawan, Deni dan Kunkun Nur Fauzi. 2015. *Sistem Informasi Manajemen*. Cetakan Ke 3. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Goal, L, Jimmy. 2008. *Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Jugiyanto. 2008. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jugiyanto. 2009. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyasa, E. 2007. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan pembelajaran Kreatif dan menyenangkan*. Bandung: Rosda
- Muslich, Masnur. 2007. *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*. Jakarta: PT. Bumi Angkasa
- Ngalim, Purwanto. 2010. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sagala, Syaiful. 2009. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Schein, E. H. 2008. *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass
- Suhardan, Dadang. 2010. *Supervisi Profesional (Layanan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Era Otonomi daerah)*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suharsaputra, Uhar. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Bumi Aksara
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti, Irine Diana Sari, *Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008.